

ARAH STRATEGIS/PETA JALAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI



Bambang Widianto

Deputi Setwapres Bidang Kesra
dan Penanggulangan Kemiskinan/
Sekretaris Eksekutif TNP2K

Jakarta | Desember 2012

KARAKTERISTIK

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)

PNPM merupakan kemitraan Pemerintah dan Kelompok Masyarakat

- Proses partisipatif dengan fasilitasi pemberdayaan penduduk miskin / marjinal
- Alokasi dana langsung kepada kelompok masyarakat berbasis manajemen lokal
- Sistem yang transparan, terbuka, dengan pembinaan dan pengawasan/audit oleh masyarakat

MODAL SOSIAL
(kohesi, *trust* , gotong royong,)

KELOMPOK SOSIAL
(UPK, BKM, BumDes)

AKSES
(Layanan dasar, informasi, keuangan)

**MASYARAKAT
MANDIRI,
MAJU,
DAN SEJAHTERA**

PNPM MEMBANTU PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Melalui:

- Pembangunan infrastruktur di komunitas lokal
- Penciptaan kegiatan usaha ekonomi untuk menyerap tenaga kerja lokal
- Penyediaan akses pasar bagi masyarakat miskin/marjinal
- Mitigasi efek bencana/krisis
- Peningkatan partisipasi komunitas dalam tata kelola pemerintahan

PNPM MANDIRI MEMILIKI CAKUPAN NASIONAL

	2011	2012
PNPM Perdesaan	5.020 kec	5.100 kec
PNPM Perkotaan	1.153 kec (10.948 kel)	1.151 kec (10.930 kel)
PNPM PISEW	237 kec	237 kec
RIS PNPM / PPIP	215 kec (1.500 desa)	215 kec (1.237 desa)
PNPM P2DTK	-- 75 kab/kota	-- 80 kab/kota
CAKUPAN PNPM	6.625 kec	6.703 kec

Catatan:

1. Data bersumber dari unit MONEV Pokja Pengendali, Des 2011
2. P2DTK tidak eskplisit sasaran kec, tergantung hasil perencanaan/prioritas masyarakat
3. Jumlah kecamatan = **6.636 kecamatan** (sumber Ditjen KUM, Kemendagri, Mei 2010).

PERKEMBANGAN ANGGARAN PNPM 2007 – 2010 (MILIAR)

Program	2007	2008	2009	2010
PNPM Perdesaan	1.841	4.284,1	6.987,1	9.629
PNPM Perkotaan	1.994	1.414,8	1.737,0	1.509,5
PPIP	-	550.0	450	736.4
RIS-PNPM	-	-	500	489.5
PISEW	-	52.5	485.3	499.5
P2DTK	-	387.0	195,9	57.0
TOTAL	3.835	6.688,4	10.355,3	13.048.2

Sumber : BAPPENAS, 2010

Keterangan:

* Alokasi per kecamatan termasuk BLM dan TA, hanya dari APBN.

** Belum termasuk *Green KDP*. Alokasi/kecamatan berdasar jumlah kecamatan 2009.

PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA

Yang telah dibangun selama 2007-2010

Prasarana/Sarana	PNPM Mandiri Perdesaan	PNPM Mandiri Perkotaan
Jalan	65.500 km	64.445 km
Jembatan	9.000 unit	438 km
Saluran irigasi	11.000 unit	
Sistem Air Bersih	28.300 unit	1.210 km 100.653 unit
Drainase		17.506 km
MCK	17.500 unit	91.464 unit
Perbaikan/Pembangunan Sekolah	6.950 unit	
Beasiswa	120.000 siswa	
Puskemas/Pustu	5.700 unit	
Rumah Layak Huni		190.163 unit
Pembuangan Sampah		96.548 unit

Prasarana/Sarana lainnya meliputi :

- saluran limbah,
- saluran irigasi
- penerangan jalan
- tambatan perahu
- sarana pendidikan kesehatan, perdagangan

SITUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PNPM SAAT INI

- 1 Munculnya berbagai program pemberdayaan masyarakat dengan label PNPM (dan juga bukan PNPM), dan berjalan di tengah masyarakat dengan variasi pelaksanaan yang besar
- 2 Prinsip partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat saat ini belum mewarnai perencanaan sektoral dan perencanaan di daerah

PROLIFERASI dan FRAGMENTASI menimbulkan *MISSED OPPORTUNITY*

- Proliferasi program memunculkan fragmentasi dalam pemberdayaan masyarakat
- Koordinasi yang lemah di antara *Inti* dan *Penguatan* memunculkan variasi dalam kualitas implementasi
- Timbul *missed opportunities* (skala ekonomi kegiatan dan dampak kemiskinan),
- Kebingungan antar masyarakat dan pendamping dalam pendekatan pemberdayaan dan tujuan program
- PNPM memiliki dampak terbatas kepada tata kelola pemerintahan daerah dan institusi lokal di desa, kecamatan, atau kabupaten

VARIASI PELAKSANAAN PNPM

Hasil evaluasi Sekretariat TNP2K terhadap 11 PNPM yang sedang berjalan menunjukkan variasi dalam implementasi berbagai elemen kegiatan pemberdayaan masyarakat

**L
E
M
A
H**

1. FASILITASI / PENDAMPINGAN
2. PARTISIPASI KOMUNITAS
3. PENGORGANISASIAN KELOMPOK
4. TRANSPARANSI
5. SISTEM PENGAWASAN
6. PERSPEKTIF JENDER

**K
U
A
T**

VARIASI PELAKSANAAN PNPM MANDIRI

PNPM	FASILITASI	PARTISIPASI	PARTISIPASI	TRANSPARANSI	PENGAWASAN	JENDER
PERKOTAAN	●	●	●	●	●	●
PERDESAAN	●	●	●	●	●	●
PPIP/RIS	●	●	●	●	●	●
PISEW	●	●	●	●	●	●
P2DTK	●	●	●	●	●	●
PERUMAHAN	●	○	○	○	○	○
KP	●	○	○	○	○	○
PUAP	●	○	○	○	○	○
GSC	●	●	●	●	●	●
LMP	●	●	●	●	●	●
INTEGRASI	●	●	●	●	●	●

PETA JALAN/ROAD MAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)

SEKRETARIAT TNP2K BERSAMA KEMENKOKESRA TELAH MENTERJEMAHKAN
2 ARAH STRATEGIS → 5 PILAR → 20 RENCANA AKSI

1

**KONSOLIDASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN**

2

**INTEGRASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**Pilar
1**

Integrasi
Program
Pemberdayaan
Masyarakat

**Pilar
2**

Keberlanjutan
Pendampingan

**Pilar
3**

Penguatan
Kelembagaan
Masyarakat

**Pilar
4**

Penguatan
Peran
Pemerintah
Daerah

**Pilar
5**

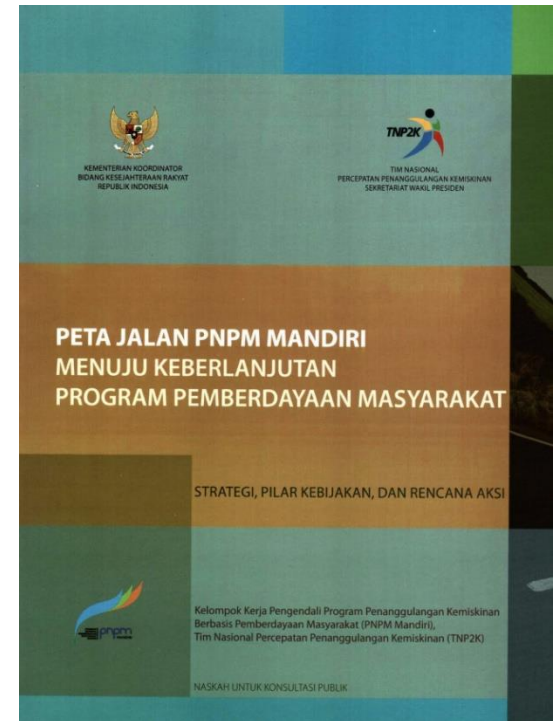
Perwujudan
Tata Kelola
Yang Baik

20 (duapuluh) Rencana Aksi

LANGKAH BERIKUT:

1. SOSIALISASI

- Telah diselesaikan: Buku Road Map dan juga bahan tayangan (film) untuk kegiatan sosialisasi
- Sosialisasi dimaksudkan agar seluruh pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat mengerti dan mendukung peta jalan pemberdayaan masyarakat
- Sosialisasi Road Map kepada pemangku kepentingan pemberdayaan masyarakat di 4 kota (Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar) – dengan puncaknya pada Pertemuan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (awal Desember 2012)



LANGKAH BERIKUT:

2. PERBAIKAN PERATURAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Telah disusun 12 agenda kerja yang akan difasilitasi oleh Sekretariat TNP2K
- Rapat koordinasi tingkat Eselon 1
- Rapat Pleno TNP2K dipimpin Wakil Presiden

12 AGENDA KERJA PERBAIKAN PERATURAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Substansi & Topik Bahasan	Tingkat Intervensi
1	Penerapan Penggunaan BDT dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	Dibuatkan menjadi aturan
2	Peningkatan Sinergitas Perencanaan Partisipatif dengan Perencanaan Reguler	Permendagri 66/2007, Permendagri 54/2010, SE Mendagri 414.2/2207/PMD
3	Perumusan Standarisasi Kompetensi dan Renumerasi Pendamping Masyarakat	Permendagri 7/2007, Permendagri 19/2007
4	Penguatan Peran dan Kapasitas TKPK Daerah dalam Pengelolaan Program PM	Perpres 15/2010, Permendagri 42/2010
5	Penyusunan Pedoman Kemitraan Pusat-Daerah dalam pelaksanaan program PM	PP 38/2007
6	Kebijakan tentang prinsip “Transparansi dan Akuntabilitas Sosial”	Dibuatkan menjadi aturan

12 AGENDA KERJA PERBAIKAN PERATURAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Substansi & Topik Bahasan	Tingkat Intervensi
7	Penetapan KPI Program Pemberdayaan Masyarakat	Dibuatkan menjadi aturan
8	Perumusan Mekanisme Transfer Langsung Dana Hibah kepada Kelompok Masyarakat	PMK 168/2009, PP 19/2008, PP 7/2008
9	Penguatan Kecamatan sebagai SKPD yang mengurus pelaksanaan program PM	PP 19/2008
10	Penetapan Legal-Basis Mekanisme Tanggung Jawab Pemeliharaan Aset oleh Pemda	PTO PNPM
11	Perumusan Dasar Hukum Eksistensi Kelembagaan Masyarakat	PP 72/2005, Permendagri 5/2007
12	Penyusunan Format Kebijakan Kelembagaan Dana Bergulir	Permendagri 61/2007, PP 8/2007, PP 23/2005, PermenKUKM 009/PER/LPDB/2011



TERIMA KASIH